

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam cukup besar, baik sumber daya yang tidak dapat terbaharui maupun diperbaharui. Sumber daya alam Indonesia beragam, khususnya di sektor pertambangan serta energi terdapat minyak bumi, batubara, bijih besi, timah, bijih nikel, dan lain-lain. Sejak 1999, Indonesia lebih menitik beratkan pembangunan ekonomi ekstratif, seperti pertambangan batubara. Walaupun cadangan batubara hanya 3% dari total cadangan batubara dunia sebesar 104 miliar ton dan cadangan 21 miliar ton. Sektor ini dieksploitasi secara besar-besaran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya beberapa daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang kaya sumberdaya alam.

Kalimantan merupakan pulau terbesar yang memiliki sumberdaya alam khususnya di sektor energi dan pertambangan . Sesuai dengan kondisi sumber daya dan geografis Pulau Kalimantan, Pemerintah Pusat menetapkan wilayah ini sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang serta lumbung energi nasional dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Menurut data yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penopang utama perekonomian koridor Kalimantan adalah sektor migas dan pertambangan berkontribusi sekitar 50% dari total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kalimantan. Pulau ini memiliki cadangan batubara sebesar 51,9 miliar ton atau 49,6 % sumberdaya indonesia, eksploitasi dan industri migas terbesar kedua di Indonesia setelah blok Cepu, 84 persen cadangan besi baja primer Indonesia terdapat di Kalimantan, 80 persen bauksit (bahan baku almunium) berada di Kalimantan, perkebunan kelapa sawit, kayu, gambut, Granit, dan lainnya. (www.bappedakaltim.com, 23 Mei 2015).

Pembangunan ekonomi wilayah Kalimantan lebih mengutamakan eksploitasi sumberdaya alam. Kalimantan Barat merupakan provinsi yang mengutamakan penambangan bauksit (bahan baku almunium), kelapa sawit, dan

pariwisata. Kalimantan Tengah mengutamakan penambangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan penambangan bijih besi. Kalimantan Selatan ditopang oleh penambangan batubara, pertanian dan industri pengolahan. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur digerakan oleh eksploitasi migas, batubara, hasil hutan dan perkebunan kelapa sawit.

Sejak masa kolonial Belanda, kawasan Kalimantan Timur dikenal sebagai lumbung energi khususnya adanya sumur, pengilangan minyak dan LNG (*Liquefied natural gas*). Dikenal kawasan Blok Mahakam, Sanga-sanga, Memburungan, Selat Makasar, Handil, Kutai dan lainnya sebagai ladang minyak dan gas. Untuk memperkuat hegemoninya dalam Perang Dunia ke-2, Jepang membutuhkan sumber daya energi yang besar. Pada tahun 1941, ladang minyak di Tarakan, Sanga-sanga dan kilang minyak di Balikpapan dikuasai Jepang sebelum menguasai wilayah Indonesia yang lainnya. Industri minyak Kalimantan Timur di Kota Balikpapan merupakan blok terbesar kedua setelah Blok Cepu, Jawa Tengah. Sisa kejayaan industri minyak pada masa Kolonial dan Orde masih terlihat hingga saat ini sebagai PDRB kedua setelah batubara. Walaupun, kini sumur-sumur minyak di Kalimantan Timur sudah tua

Provinsi terluas di Pulau Kalimantan ini, pada tahun 1970-an menjadi lumbung *longging* nasional. Masa itu dikenal sebagai “*timber boom*” (Manning, 1971, hlm. 30). Kalimantan Timur kala itu bertanggung jawab terhadap naiknya produksi kayu nasional, meskipun hanya 25 persen dari total produksi hutan ada di provinsi ini, tapi memasok 50 persen ekspor kayu gelondongan pada 1970. Tiga puluh persen dari 89 proyek investasi hutan berada di sini. Masa itu dikenal dengan istilah “banjir kap”. Kini hanya tersisa bangunan-bangunan tua pabrik pengolahan kayu.

Kalimantan Timur sebagai provinsi penyumbang PDRB terbesar dibandingkan daerah lain di pulau Kalimantan. Ditopang oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang tumbuh pesat dalam sektor penambangan batubara, eksploitasi migas dan industri migas. Berdasarkan data Dirjen Minerba tahun 2009, porsi cadangan batubara di Kalimantan hampir 50 persen dari cadangan batubara nasional terdapat di Kalimantan. Lebih dari 70 persen cadangan batubara

Kalimantan terkonsentrasi di provinsi Kalimantan Timur. Sehingga, PAD rata-rata Pemerintah Kabupaten di Kalimantan Timur diatas 40 persen berasal dari pertambangan batubara. Batubara menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur selama periode diberlakukannya Otonomi Daerah. Ambil contoh, Kabupaten Kutai Kartanegara 67 persen PDRB-nya berasal dari penambangan batubara diikuti kabupaten lain seperti Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Paser dan lainnya (Kalimantan Timur Dalam Angka 2010, hlm. 8).

Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong dikenal sebagai kabupaten terkaya di Kalimantan Timur. Daerah penghasil minyak bumi, *logging* (kayu), batubara, dan perkebunan kelapa sawit. Minyak bumi terkonsentari di wilayah pesisir dan lepas pantai yakni Delta Mahakam yang dikuasai perusahaan Multi nasional. Kutai Kartanegara menjadi sentra industri kayu merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan pusat. Jika dulu menjadi produsen beragam produk alam, maka pada masa Orde baru menjadi sentra kayu. Di sepanjang tepian Sungai Mahakam muncul pabrik-pabrik pengolahan kayu. Pertambangan yang diusahakan rakyat dan perusahaan di Kutai lebih dikenal di daerah Loa Kulu, sudah dimulai aktivitasnya sejak jaman kolonial. Untuk perkebunan kelapa sawit terkonsentrasi di daerah pedalaman Kabupaten.

Kekuatan ekonomi Kutai Kartanegara ditopang oleh kecamatan-kecamatan yang berada di pesisir. Kecamatan Samboja sebagai kecamatan di pesisir yang kaya minyak (PT TOTAL Indonesia beroperasi di Senipah), sentral perikanan laut (Senipah), kayu, perkebunan kelapa sawit, pertanian, peternakan dan batubara. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, membuat Samboja merasakan dampak pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan. Samboja merupakan penyumbang PAD terbesar Kabupaten Kutai Kartanegara dibandingkan kecamatan lainnya. Kecamatan Samboja ikut berperan aktif pada masa *timber boom* tahun 1970 hingga 1990 yang dialami Kalimantan Timur. Samboja memiliki wilayah yang strategis dikarenakan dekat dengan pelabuhan Semayang Balikpapan. sehingga, sepanjang jalan Balikpapan- Handil 2 berdiri berbagai pengolahan kayu rakyat maupun pabrik-pabrik *plywood*. Setiap

kelurahan minimal ada 5 pengolahan kayu rakyat, orang setempat menyebutnya Somel. Somel dan pabrik *plywood* merupakan mesin pendorong penebangan pohon-pohon hutan yang berada di Samboja. Somel didirikan oleh pendatang dari Jawa dan Sulawesi, yang membawa anak buah dan keluarganya untuk menetap. Warga yang berusia diatas 50 tahun pernah terlibat dalam masa itu. Industri *logging* mengalami penurunan pasca diterbitkannya Undang-undang kehutanan pada tahun 1999 disertai berkurangnya kawasan hutan yang mudah diakses dengan biaya yang rendah.

Di Samboja, Pertambangan batubara mulai diminati masyarakat setelah bisnis kayu lesu, persediaan kayu hutan menipis. Babak baru pertambangan batubara rakyat dimulai dengan berdirinya KUD Rukun Sentosa sebagai koperasi pertambangan pertama di Kecamatan Samboja. Satu per satu penambang rakyat bermunculan. Koperasi dijadikan sebagai induk segala legalitas dikarenakan memiliki surat Kuasa Pertambangan (KP). Namun, pertumbuhan penambang batubara ilegal lebih cepat dikarenakan tanah mereka dapat diubah jadi lahan tambang dengan bantuan buruh-buruh yang didatangkan dari Jawa dan Sulawesi.

Jumlah penambang batubara rakyat terus meningkat seiring dengan mudahnya mendapatkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari KUD Rukun Sentosa. Bukan rahasia umum, semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan SKAB hanya dengan membayar *fee* kepada pengurus. Batubara menjadi berita publik ditempat berkumpul seperti di pasar, warung, masjid, ronda dan lainnya. Semua masyarakat ‘demam’ batubara seperti pada sektor *logging* beberapa tahun sebelumnya. Bahkan, anak kecil tau bahwa mereka berdiri diatas pulau batubara. Ada semacam kebanggaan mereka lahir dan besar di pulau paling kaya dan besar di republik ini. Sebagian besar penambang rakyat menambang di tanahnya sendiri atau menambang ditanah milik orang lain dengan sistem bagi hasil (Pak Tajudin, wawancara pada tanggal 11 Juni 2015).

Masyarakat Samboja mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat semenjak pertambangan batubara menjadi pilihan mata pencarian. Sebelumnya, truk-truk pengangkut kayu kini mengangkut karung-karung berisi batubara. Masyarakat lebih mengenal pengepul batubara daripada kayu. Seiring tumbuhnya

tambang batubara, warung-warung kecil pun ikut bermunculan di sekitar kawasan tambang. Usaha rental mobil dan truk ikut tumbuh. Bengkel kendaraan roda empat juga mengalami pertumbuhan signifikan, utamanya untuk *service* truk pengangkut batubara. Untuk memenuhi kurangnya tenaga kerja. Penambang mendatangkan buruh dari pulau jawa, utamanya Jawa Timur dan Tengah. Sehingga, pembangunan rumah maupun bisnis penginapan merasakan efek dari tumbuhnya pertambangan batubara di kawasan Samboja. Rumah-rumah yang dulunya berdinding kayu, berubah berdindingkan batu beton.

Selain penambang rakyat, beberapa perusahaan yang memiliki modal besar mulai ikut terlibat, sebut saja namanya PT Singlurus Pratama yang memiliki PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) untuk wilayah Kecamatan Samboja. Penambang yang ingin menambang ditanahnya harus mengurus ijin pertambangannya ke pihak perusahaan. Karena, kawasan Samboja sebagian besar sudah diplot oleh PT Singlurus Pratama. Dengan keterbatasan dana, sulit bagi masyarakat untuk mengurus perijinan tambang yang membutuhkan waktu 1 sampai 2 tahun. Ruang gerak penambang rakyat mulai terbatas sehingga presentase jumlah penambang mulai menurun.

Pada tahun 2005, keluar kebijakan pemerintahn mengenai Undang-Undang yang melarang pertambangan. Kebijakan mulai diimplementasikan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2006. Penambangan rakyat sulit untuk melakukan pertambangan karena sebagian besar dari para penambang rakyat tidak memiliki surat izin pertambangan. Sebagian yang memiliki dana membuat surat izin usaha pertambangan (IUP). Menurut Koordinator Hukum jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah, Samboja memiliki 92 ijin pertambangan batubara. 91 ijin berstatus Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintahan Kabupaten. 1 ijin berstatus Perjanjian Karya Pengusahaan pertambangan Batubara (PKP2B) yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari data tersebut, sekita 50 persen wilayah Samboja masuk dalam kawasan IUP. Dari luas IUP 500km² itu, sekitar 20 persen sudah dieksploitasi, sekitar 50 persen diantaranya masuk dalam tahap eksploitasi dan 30 persen berstatus penyelidikan umum. Belum termasuk penambang ilegal yang tidak terdata. Dengan status 92

ijin pertambangan batubara dalam satu kecamatan, Samboja layak mendapatkan predikat daerah setingkat kecamatan yang memiliki ijin tambang batubara terbanyak di dunia. Penambang rakyat yang tidak punya dana dan ‘nakal’. Lebih memilih menambang secara ilegal dikarenakan harus membayar iuran tambang pada pemerintah daerah. Sepanjang tahun, 2006-2007 banyak penambang ilegal yang ditangkap dan dipenjara.

Tidak dapat dipungkiri, dampak negatif sektor pertambangan dialami oleh Kecamatan Samboja. Pembangunan ekstratif memberikan dampak besar dan cepat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Samboja. Tapi juga, berdampak buruk bagi lingkungan. Kecamatan Samboja sebelumnya tidak pernah terkena banjir, sejak adanya pertambangan batubara setiap kali hujan besar pasti banjir. Jalan dipenuhi debu hitam, jalan raya rusak dikarenakan adanya truk pengangkut batubara yang hilir mudik, kemacetan, sering terjadi kecelakaan warga dengan truk pengangkut batubara, genteng-genteng rumah berdebu hitam, air sungai tercemar, semakin sempitnya kawasan hutan dan lahan pertanian.

Berdasarkan uraian dan alasan di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait pertambangan batubara rakyat di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka penulis merumuskan judul: “Pertambangan Batubara Rakyat di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Kajian Historis tahun 1999-2013)”. Perspektif ini bukan untuk dilihat dalam kacamata penghakiman. Untuk menghindari hal tersebut, kajian ini ditempatkan dalam konteks wacana intelektual. Kajian ini ditekankan pada pencarian solusi terhadap realitas sejarah yang terjadi.

Adapun untuk pengambilan kurun waktu tahun 1999-2013, karena pada tahun 1999 merupakan tahun berdirinya Koperasi Tambang pertama di Kecamatan Samboja yaitu KUD Rukun Sentosa, mulai munculnya konsep Otonomi Daerah dengan keluarnya kebijakan desentralisasi berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, Kabupaten Keistimewaan Kutai sebagai induk Kutai mengubah nama menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara , dan diangkatnya Syaukani Hasan Rais sebagai bupati pertama Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahun 2013, jumlah

penambang rakyat berkurang drastis dikarenakan turun harga dan permintaan batubara dikarenakan semakin tingginya biaya operasional penambangan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan pokok adalah “Bagaimana perkembangan dan tantangan penambangan batubara rakyat di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 1999-2013)”.

Sementara untuk membatasi kajian penelitian ini, maka diajukanlah beberapa pertanyaan sekaligus sebagai rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kondisi penduduk Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Bagaimana perkembangan pertambangan batubara rakyat di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara?
3. Bagaimana upaya penambang batubara rakyat di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara?
4. Bagaimana kontribusi penambang batubara rakyat terhadap lingkungan sosial-ekonomi dan geologis di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok pemikiran diatas, untuk menjawab dan memecahkan rumusan masalah yang ada merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh penulis. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memaparkan *Pertambangan Batubara Rakyat di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Kajian Historis Tahun 1999-2013)*. Selain itu, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran mengenai keadaan sosial-ekonomi masyarakat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi mata pencarian, kondisi geologis, kependudukan, serta aspek-aspek sosial lainnya.

2. Mendeskripsikan perkembangan pertambangan rakyat di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 1999-2013 dengan melihat aspek jumlah pengusaha, modal, jumlah tenaga kerja, pemasaran dan lainnya.
3. Mendeskripsikan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat kecamatan Samboja sebelum tahun 1999.
4. Mendeskripsikan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat samboja setelah otonomi daerah Kutai tahun 1999.
5. Mendeskripsikan kemunculan penambangan batubara rakyat di kecamatan Samboja.
6. Mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi oleh penambang rakyat yang terdiri dari perijinan, manajemen produksi, pemasaran dan lingkungan.
7. Mendeskripsikan pola sosial ekonomi masyarakat kecamatan Samboja semenjak keterbatasan ruang gerak penambang lokal tahun 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang didapatkan dengan mengkaji Pertambangan Batubara Rakyat di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Kajian Historis Tahun 1999-2013) diantaranya:

1. Bagi penulis, dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah sebagai aplikasi teori yang didapatkan selama perkuliahan untuk menarik sebuah kesimpulan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan ilmiah. Selain itu, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam ilmu ekonomi dan sosiologi.
2. Bagi UPI khususnya jurusan Pendidikan Sejarah, memperkaya penulisan sejarah lokal dengan tema Pertambangan Rakyat khususnya di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan pertambangan rakyat di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, serta memberikan pendidikan mengenai perekonomian di Indonesia.

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun mengenai sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang didalamnya berisi mengenai latar belakang masalah yang menguraikan tentang Pertambangan Batubara Rakyat di Kutai Kartanegara (Kajian Historis Tahun 1999-2013), yang akan diperjelas dengan rumusan masalah dan pembatasan masalah yang sesuai dan relevan sehingga dapat dikaji dalam penulisan skripsi. Dalam bab ini juga berisi mengenai, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan skripsi guna menjadikan suatu karya tulis ilmiah yang layak dibaca.

Bab II, berisi mengenai Kajian Pustaka. Dalam bab ini dijlaskan beberapa sumber literatur mengenai kajian serta materi bersangkutan, berdasarkan sumber-sumber yang kevaliditasnya dapat dipercaya serta relevan. Kajian ini menjadi acuan dasar bagi penulis untuk memahami temuan-temuan yang penulis peroleh di lapangan. Pokok-pokok yang akan digambarkan dalam bab ini adalah mengenai sejarah pertambangan batubara di Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bab III berisi mengenai Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis memaparkan pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan mulai dari tempat, waktu dan tahapan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan Metode Historis yang terdiri dari empat langkah yaitu, Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Heuristik adalah pengumpulan dan pencarian sumber-sumber tertulis yang sesuai dengan kajian tulisan. Kritik adalah penilaian dan pengolahan data sejarah yang dilihat dari sisi internal dan sisi eksternalnya sehingga dapat menghasilkan fakta yang objektif, valid, dan dapat dipercaya. Interpretasi adalah proses penafsiran penulis terhadap fakta-fakta yang telah didapatkan pada dua tahap sebelumnya sesuai dengan metode dan pendekatan yang dilakukan oleh penulis. Kemudian akhir, Historiografi yaitu proses penulisan fakta-fakta sejarah ke dalam suatu bentuk tulisan yang dalam hal ini berupa skripsi.

Bab IV berisi mengenai pembahasan. Dalam bab ini akan membahas lebih dalam dan terperinci mengenai studi kajian yang dilakukan penulis, sesuai dengan

sumber-sumber tertulis yang relevan dan sesuai hasil wawancara yang penulis lakukan. Bab ini merupakan pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan penulis pada bab I.

Bab V berisi mengenai Simpulan dan Saran. Pada bab terakhir ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan seluruh rangkaian penulisan sejarah berupa jawaban-jawaban dari pernyataan yang diajukan, sebagai intisari dari ringkasan pada bab-bab sebelumnya serta mendeskripsikan hasil-hasil temuan penulis mengenai permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini. Selain itu juga saran yang dikemukakan penulis sehingga kelak dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.